

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kata miskin diartikan tidak berharta atau serba kekurangan, miskin dalam artian tidak berharta yaitu tidak memiliki tempat tinggal yang layak, kebutuhan yang serba kekurangan dan penghasilan yang masih sangat rendah. Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal sebagai tempat berteduh. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua Negara di dunia, terutama Negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan telah membatasi kesempatan bagi suatu masyarakat untuk mendapatkan hak nya sebagai manusia untuk memperoleh akses kebutuhan hidup yang layak. Masalah kemiskinan memiliki banyak aspek. Diantara aspek-aspek tersebut adalah aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial ialah adanya ketidaksamaan sosial diantara warga masyarakat yang bersangkutan, seperti perbedaan suku bangsa, ras dan usia yang bersumber dari corak sistem lapisan sosial yang ada dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud aspek ekonomi adalah adanya ketidaksamaan diantara sesama warga masyarakat dalam hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan individu dan perekonomian disuatu Negara (Khoerudin, 2016, hal. 163).

Saat ini presentasi penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 adalah sebesar 9,22%. Pertumbuhan ekonomi yang kuat di Indonesia telah membantu menekan angka kemiskinan. Angka kemiskinan menurun 0,19% terhadap maret 2019 dan menurun 0,44% terhadap September 2018. Banyak penduduk Indonesia yang berhasil keluar dari kemiskinan (Indonesia, 2019). Sedangkan persentasi penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2006-2014 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1** : Data Jumlah Penduduk Miskin dan Persentasinya Tahun 2006-2014

Tahun	Penduduk Miskin (orang)	%	Penurunan
2006	24. 881	10,39	-
2007	19,275	8,14	5.606
2008	17,151	7,12	2.124
2009	13,924	5,73	3.227
2010	15.400	6,32	+1.476
2011	14.891	5,98	509
2012	14.195	5,68	696
2013	14.181	5,57	14
2014	14.557	5,65	+376

Dalam kehidupan bermasyarakat dari dulu hingga sekarang kemiskinan adalah sesuatu yang tidak pernah luput dari realita sosial, bukan hal baru lagi jika kemiskinan menjadi salah satu permasalahan pelik yang selalu dihadapi oleh pemerintah. Kemiskinan yang terjadi tidak luput karena masih adanya celah antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Untuk itu diperlukan peranan pemerintah untuk dapat membuat program pengembangan masyarakat yang dapat secara nyata

meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena dalam Islam sesama umat muslim diperintahkan untuk saling tolong-menolong sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Q.S Ar-Rum ayat 38 berikut ini :

فَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ  
وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan[1171]. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung. (Q.S Ar-Rum : 38)*

Disadari atau tidak bahwa setiap manusia dimuka bumi ini tidak akan bisa lepas dari dunia perekonomian karena hal tersebut adalah fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya. (Johan, 2009, hal. 31)Ekonomi merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu bangsa. Dalam Islam kesejahteraan tidak hanya dinilai dari ukuran material saja, tetapi dinilai juga dari ukuran non-material seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya keharmonisan sosial.

Pemerintah dalam usahanya menurunkan tingginya angka kemiskinan pada masyarakat yaitu dengan meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, dengan melalui program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS, RASKIN, BSM, PKH), program

berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), dan Pemberdayaan Usaha Mikro (KUR) bagi masyarakat kurang mampu (Kartiawati, Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, 2017, hal. 10).

Salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu suatu program yang memberikan bantuan berupa uang tunai kepada keluarga miskin, jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, kriteria penerima bantuan PKH yaitu keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH dengan kriteria komponen kesehatan, kriteria komponen pendidikan dan kriteria komponen kesejahteraan sosial.

Program PKH ini merupakan program yang dibuat oleh kementerian sosial RI yang berlandaskan pada keputusan menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 september 2007.

Tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup

keluarga miskin. PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program atau tahap uji coba. Tujuan uji coba adalah untuk menguji berbagai instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH seperti antara lain metode penentuan sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran dan pengaduan masyarakat.

Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH non tunai meliputi :

- a. Pembukaan rekening penerima bantuan social
- b. Sosialisasi dan edukasi
- c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- d. Proses penyaluran bantuan sosial PKH
- e. Penarikan dana bantuan sosial PKH
- f. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan sosial.

Berikut ini adalah tabel mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH non tunai, yaitu :

**Tabel 1.2 :** Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan

Pembukaan rekening KPM	Sosialisasi dan Edukasi	Distribusi KKS	Penyaluran bantuan	Penarikan dana Bansos PKH	Rekonsiliasi hasil penyaluran Bansos PKH	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bansos
1. Pembukaan rekening secara kolektif 2. Cetak kartu 3. Produksi PIN Mailer 4. Laporan hasil proses Pembukaan rekening secara kolektif.	1. Sosialisasi Bansos non tunai kepada pendamping PKH 2. Sosialisasi Bansos non tunai PKH kepada agen dan KPM oleh bank penyalur dan kemensos (KPM baru)	1. Distribusi KKS, buku tabungan dan PIN <i>mailer</i> dari KP ke KC 2. Distribusi KKS, buku tabungan dan PIN <i>Mailer</i> dari KC kepada KPM 3. Penandatanganan aplikasi pembukaan rekening dan surat pernyataan persetujuan atau kuasa untuk memberikan informasi nomor rekening dan data pribadi. 4. <i>Full</i> aktivasi 5. Laporan hasil penerimaan aplikasi pembukaan rekening.	1. Pengecekan rekening dengan data yang akan diajukan bantuannya 2. Pengajuan dana ke KPPN 3. Pembuatan surat perintah pemindahan buku / <i>standing Instruction</i> (SI) ke Bank penyalur pusat. 4. Pelaksanaan pemindahan buku 5. Laporan hasil pemindahan buku	1. Dinas Sosial dan bank penyalur melakukan koordinasi persiapan penarikan dana bansos PKH 2. Penarikan Dana oleh KPM	1. Rekonsiliasi berjenjang dari tingkat kabupaten / kota, provinsi, ke tingkat pusat 2. Rekonsiliasi dilakukan oleh Bank Penyalur bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten / Kota, Provinsi, dan tingkat pusat	1. Laporan periodic setiap tahap penyaluran 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKH 3. Analisa kecenderungan penyaluran bansos dari <i>dashboard</i> 4. Analisa kecenderungan pengaduan terkait penyaluran bansos berdasarkan laporan <i>contact centre</i> PKH

Berikut adalah persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2015-2018 :

**Tabel 1.3** : Data Jumlah Penduduk Miskin dari Tahun 2015 - 2018

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2015	15050 Jiwa
2016	16300 Jiwa
2017	16200 Jiwa
2018	16100 Jiwa

Dari tabel diatas diperoleh fakta bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2015-2018 mengalami peningkatan yang signifikan walaupun program pemerintah sudah lama dijalankan. Seharusnya yang terjadi adalah semakin sedikitnya jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Indonesia, 2019). Melihat hal tersebut, maka Program Keluarga Harapan bukanlah suatu proses pengentasan kemiskinan yang mudah dilakukan, melainkan suatu proses yang membutuhkan kemampuan yang baik, baik itu dari sisi pemerintah maupun dari komponen masyarakat terutama masyarakat yang tergolong miskin.

Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.670 jiwa merupakan salah satu Desa yang telah menerima bantuan Program Keluarga Harapan, menurut keterangan dari pendamping PKH di Desa Kias yaitu Ibu Ella, beliau menyatakan bahwa bantuan

PKH di Desa Kias sudah berjalan selama 12 tahun, terhitung dari tahun 2008 sampai sekarang, yaitu tahun 2020. Dengan adanya bantuan PKH ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan membantu masyarakat kurang mampu di Desa Kias untuk lebih sejahtera.

Desa Kias merupakan salah satu Desa yang menerima bantuan PKH dengan jumlah warga yang cukup banyak. Jumlah warga kurang mampu yang menerima bantuan PKH di Desa Kias pada tahun 2019 adalah sebanyak 84 orang dari 9 Rt yang ada di Desa tersebut.

Besaran bantuan PKH yang diberikan pemerintah kepada masyarakat penerima bantuan PKH di Desa Kias setelah dilakukan pembaharuan jumlahnya berbeda-beda. Besaran bantuan untuk setiap Rumah Tangga Miskin (RTM) peserta PKH mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.4 : Data Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan**

<b>No.</b>	<b>Komponen Bantuan</b>	<b>Indeks Bantuan (Rp)</b>
1	Bantuan ibu hamil/menyusui	Rp. 3.000.000
2	Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	Rp. 3.000.000
3	Bantuan peserta pendidikan SD/ sederajat	Rp. 900.000
4	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/ Sederajat	Rp. 1.500.000
5	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/ Sederajat	Rp. 2.000.000



6	Bantuan penyandang disabilitas berat	Rp. 2.400.000
7	Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	Rp. 2.400.000

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa besaran yang diberikan pemerintah kepada setiap komponen masyarakat berbeda-beda tergantung dari komponen mana dia berasal. Pemberian bantuan diberikan pemerintah setiap 3 bulan sekali.

Dana bantuan PKH dari pemerintah harus digunakan sesuai komponen yang didapat, misalnya penerima bantuan PKH yang anaknya masih balita digunakan untuk penambahan gizi bagi anak, penerima bantuan PKH untuk anak-anak SD-SMA sederajat digunakan untuk kebutuhan sekolah, dan untuk bantuan PKH bagi lansia harus digunakan untuk kebutuhan pemenuhan gizi. Namun sebagian penerima PKH masih ada yang menyalah gunakan uang dari bantuan pemerintah tersebut, yang seharusnya untuk kebutuhan pokok malah digunakan untuk keperluan yang tidak seharusnya.

Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan ditemukan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kias dalam hal penyaluran dana bantuan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan, akan tetapi dalam hal penerima bantuan masih ada yang kurang tepat sasaran. Seperti sekarang masih ada masyarakat yang tergolong sudah mampu, tetapi golongan tersebut masih saja menerima bantuan PKH. Dan seharusnya pemerintah desa bisa melakukan pendataan ulang agar pemanfaatan dan penerima bantuan adalah orang yang benar-benar membutuhkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk lebih mendalami tentang **Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan agar penelitian ini dapat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai maka perlu adanya rumusan yang jelas dan terarah, adapun rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan dalam mengentaskan kemiskinan?
2. Bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) menurut perspektif Ekonomi Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan dalam mengentaskan kemiskinan.
2. Untuk mengetahui Program Keluarga Harapan (PKH) menurut perspektif Ekonomi Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dapat membantu berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa kegunaan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan tentang program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan dalam perspektif ekonomi islam dan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi instansi

Diharapkan dapat memberikan manfaat maupun masukan untuk bahan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan untuk meningkatkan peran pemerintah dalam membantu pengentasan kemiskinan yang ada dimasyarakat.

- b. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang ekonomi dan diharapkan dapat menjadi tambahan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih jelas dan terarahnya penelitian ini.

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.
2. Program adalah daftar terinci mengenai acara dan usaha yang akan dilakukan. Maksud program dalam penelitian ini adalah daftar kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penerima bantuan agar bantuan ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
3. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan berupa uang tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya.
4. Mengentaskan kemiskinan adalah memperbaiki masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan, nasib atau keadaan yang kurang baik kepada yang lebih baik.
5. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan serta pendapatan dibawah Rp. 600.000 perbulan (Indonesia, 2019)

6. Kecamatan Batang Alai Selatan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terdiri dari 19 desa.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Melihat berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Desa Kias kecamatan Batang Alai Selatan, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang hal tersebut. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Skripsi oleh Cita Fauziatul Akmala (13250100) dari State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 yang berjudul *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa proses implementasi dalam hal sosialisasi sudah dilakukan dengan baik, yang perlu lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah di Kelurahan Kranggan adalah kemiskinan yang berbentuk absolut. Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang Implementasi Program Keluarga Harapan. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang Implementasi Program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan dalam perspektif Ekonomi Islam sedangkan Cita Fauziatul Akmala hanya

meneliti tentang Implementasi Program Keluarga Harapan, serta tempat penelitian juga berbeda.

2. Skripsi oleh Kartiawati (1351010145) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017 yang berjudul *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bantuan PKH di Kampung Bonglai masih kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan karena masih banyak penduduk miskin yang belum tercover oleh PKH. Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah sama melakukan penelitian tentang Program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan dari sudut pandang ekonomi Islam. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang Implementasi Program Keluarga Harapan, sedangkan Kartiawati tentang Analisis efektivitas Program Keluarga Harapan, dan tempat penelitian yang penulis lakukan juga berbeda.
3. Skripsi oleh Irma Mutmainnah Khoirun Nisa (17402153280) dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun 2019 yang berjudul *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi PKH di Desa Serut sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal dan perannya dalam hal kemiskinan adalah sebatas memutus rantai kemiskinan yang ada.

Untuk implementasi PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi Islam sudah maksimal. Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah sama melakukan penelitian tentang Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Adapun perbedaannya adalah tempat yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian Irma Mutmainnah Khoirun Nisa.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini ditulis dalam 5 bab yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya ilmiah dan secara umum merujuk kepada petunjuk penulisan skripsi yang diatur oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisikan tentang bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan sesuai operasional yaitu terdiri dari jenis, sifat, lokasi penelitian, data dan sumber data, serta tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang hasil penelitian di Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan yang selanjutnya membahas mengenai hasil data serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB V Penutup, dalam bab ini penulis memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran dan lampiran-lampiran.